



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

TAHUN 2025

Disusun Oleh :

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Dr. Sutomo 50, Kec. Sananwetan, Kota Blitar



(0342) 801080



dp3ap2kb.blitarkota.go.id



dp3a-p2kb@blitarkota.go.id



Dinas P3AP2KB Kota Blitar



@dp3ap2kb.kotablitar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKj IP Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, termasuk capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pelaksanaan pengarusutamaan gender, penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak, pengendalian penduduk melalui Total Fertility Rate (TFR) serta capaian nilai SAKIP.

Secara umum kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran perangkat daerah, sinergi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan di tahun tahun mendatang.

Akhirnya semoga LKj IP Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi da dasar pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi serta keluarga berkualitas di Kota Blitar

Blitar, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



MUJIANTO., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720214 199201 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

1. Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,50	68,40 *	90,60%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94	1,89	102,65%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,34)	A (85,50)	100,19 %

Catatan * : Realisasi IDG adalah realisasi tahun 2024

2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebesar Rp 8.708.917.614,00 (Delapan milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan persentase serapan anggaran pada tahun 2025 sebesar 93,28%. Dari sasaran Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar, ada yang sesuai target ataupun di atas target. Berikut realisasi anggaran per program dalam pencapaian kinerja :

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.699.278.511,00	4.581.192.603,00	97,49%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	786.109.200,00	761.209.879,00	96,83%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	154.872.409,00	126.383.956,00	81,61%
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105.204.055,00	94.028.286,00	89,38%
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	215.210.923,00	192.088.252,00	89,26%
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	218.275.629,00	185.194.792,00	84,84%
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.296.710.800,00	1.000.569.706,00	77,16%
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.233.256.087,00	1.182.988.036,00	95,92%

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasar hasil kinerja beserta realisasi anggaran maka dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja utama yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	90,60%	96,83	0,93
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	96,83	1,03
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00 %	81,61	1,22
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00 %	89,24	1,12
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	102,65%	86,19	1,19
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,19 %	97,49	1,08

4. Prestasi Tahun 2025

Prestasi yang berhasil diraih DP3AP2KB Kota Blitar pada tahun 2025 ini yaitu :

1. Juara 3 Kampung KB Rahayu Kelurahan Klampok yang diberikan oleh Kemenduk Bangsa Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Juli 2025 dan diterima oleh Kepala DP3AP2KB Kota Blitar
2. Penghargaan Kota Layak Anak Peringkat NINDYA yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2025 dan diterima oleh Walikota Blitar

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menjadi fondasi yang kuat untuk peningkatan kualitas pembangunan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berkualitas di Kota Blitar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. DASAR HUKUM	8
E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS	11
F. ISU – ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	19
C. PROGRES TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI LKJIP TAHUN 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN	30
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025	31
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 – 2025	49
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA	55
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL	58
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	60
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	69
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	72
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	75
C. PRESTASI / PENGHARGAAN	76
BAB IV PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. LANGKAH PERBAIKAN	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	18
TABEL II.2 Target Kinerja Sasaran Strategis	19
TABEL II.3 Anggaran per Program	20
TABEL II.4 Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP DP3AP2KB Tahun 2024	21
TABEL III.1 Skala Pengukuran Kinerja Sasaran	31
TABEL III.2 Pencapaian Kinerja DP3AP2KB	32
TABEL III.3 Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan	46
TABEL III.4 Pencapaian Target Pada Perjanjian Kinerja	48
TABEL III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja	49
TABEL III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2021-2026	56
TABEL III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah dengan Kab/Kota Lain	58
TABEL III.8 Persentase Realisasi Anggaran sesuai Jenis Belanja	61
TABEL III.9 Persentase Realisasi Anggaran Per Urusan	61
TABEL III.10 Persentase Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61
TABEL III.11 Persentase Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66
TABEL III.11 Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan	69
TABEL III.12 Capaian Kinerja dan Anggaran	72
TABEL III.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
TABEL IV.1 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025	82



BAB I

PENDAHULUAN



dp3ap2kb.blitarkota.go.id



dp3a-p2kb@blitarkota.go.id



Dinas P3AP2KB Kota Blitar



[@dp3ap2kb.kotablitar](https://www.tiktok.com/@dp3ap2kb.kotablitar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Setiap perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kota Blitar memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan gender di Kota Blitar.

Isu kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dinamika kependudukan serta penguatan ketahanan keluarga masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang belum sepenuhnya mencapai target menunjukkan perlunya penguatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, dan ekonomi. Disisi lain, komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak harus terus diperkuat melalui sistem layanan yang responsif, terintegrasi dan berbasis kebutuhan korban.

Dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pengaturan kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Capaian Total Fertility Rate (TFR) yang terkendali mencerminkan efektivitas program keluarga berencana, namun tetap memerlukan penguatan pendekatan berbasis keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat.

LKj IP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama perangkat daerah. laporan ini menyajikan capaian kinerja, analisis keberhasilan dan hambatan, realisasi anggaran serta rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.

Melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan terwujud evaluasi yang objektif dan komprehensif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran pada tahun mendatang, sehingga pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Blitar dapat berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kedudukan :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Blitar

Tugas :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan;
- f. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan

peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan)

- k. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- m. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan

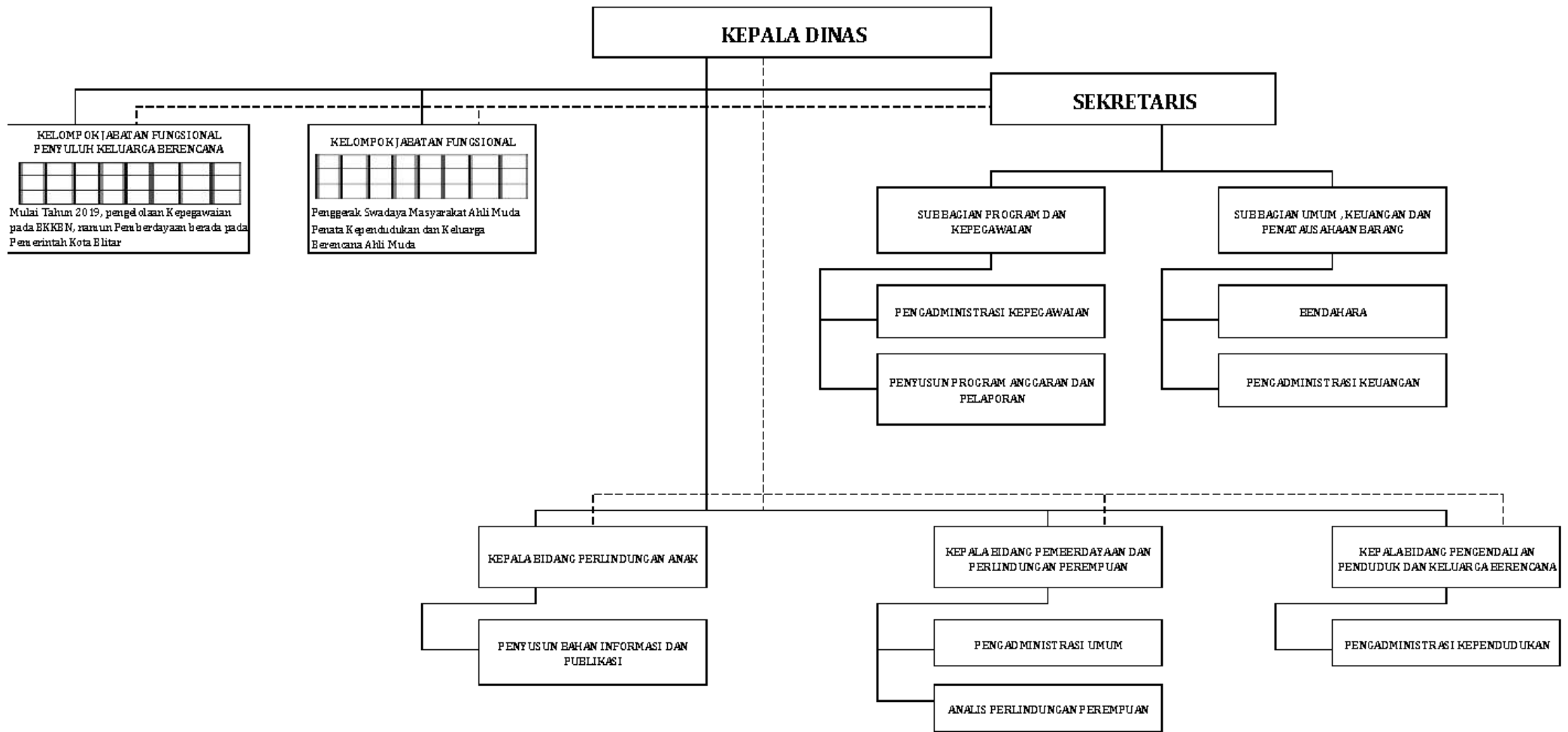
- b) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- 3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- 4. Bidang Perlindungan Anak;
- 5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
6. Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.

8. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
9. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hirarki.
11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
12. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah sebagai berikut :



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Tahun 2025 dengan tujuan :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
 20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Aspek ini menggambarkan kondisi aktual, tantangan, peluang serta isu-isu prioritas yang menjadi perhatian dalam tahun 2025.

1. Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dibidang politik, pemerintahan maupun ekonomi
- Pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kewirausahaan dan UMKM masih menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga
- Komitmen pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah berjalan di seluruh perangkat daerah, namun kualitas implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) perlu ditingkatkan

2. Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak

- Tingginya kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut sistem layanan yang cepat, terpadu dan responsif korban
- Koordinasi lintas sektor (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Layanan kesehatan) menjadi faktor kunci keberhasilan penyelesaian kasus
- Penguatan sistem pelaporan berbasis data dan teknologi informasi masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan penanganan kasus.

3. Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Capaian TFR yang terkendali menunjukkan efektivitas program KB, namun keberlanjutan pelayanan kontrasepsi dan peningkatan kesertaan KB aktif

tetap menjadi prioritas

- Dinamika struktur penduduk (bonus demografi) memerlukan penguatan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja
- Ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial perlu diperkuat melalui edukasi pengasuhan dan perencanaan keluarga

4. Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

- Nilai SAKIP yang menunjukkan kategori baik mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja yang baik
- Integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan perlu terus diperkuat agar berorientasi pada outcome
- Optimalisasi serapan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.

Tantangan dan Peluang

Tantangan :

- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran
- Perubahan regulasi dan kebijakan nasional
- Dinamika sosial masyarakat yang mempengaruhi isu gender dan perlindungan anak

Peluang :

- Dukungan kebijakan nasional terkait pembangunan SDM dan kesetaraan gender
- Komitmen pemerintah Kota terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem layanan dan pengelolaan data

Aspek strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Tahun 2025 serta sebagai kebijakan dalam merumuskan langkah perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan penting yang memerlukan penanganan prioritas karena berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, dinamika lingkungan strategis, serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, maka isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian IDG yang belum memenuhi target menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi formal. Penguatan kapasitas perempuan, perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta advokasi keterwakilan perempuan menjadi prioritas strategis.

2. Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Meskipun seluruh perangkat daerah telah melaksanakan PUG, kualitas sumber integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama terletak pada konsistensi penyusunan ARG yang benar-benar berbasis analisis gender.

3. Kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dimensi sosial, psikologis dan hukum yang kompleks. Diperlukan sistem layanan yang lebih cepat, terintegrasi dan berbasis data, serta penguatan upaya pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat

4. Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak memerlukan sinergi lintas sektor, peningkatan peran keluarga, serta penguatan mekanisme perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum maupun korban kekerasan

5. Dinamika Kependudukan dan Pengendalian Kelahiran

Capaian TFR yang terkendali perlu dijaga keberlanjutannya. Tantangan yang dihadapi antara lain keberlanjutan kesertaan KB aktif, akses pelayanan

kontrasepsi, serta perubahan pola pikir generasi muda terhadap perencanaan keluarga

6. Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil pembangunan menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan digitalisasi. Diperlukan penguatan edukasi pengasuhan, peningkatan kesejahteraan keluarga serta program pemberdayaan keluarga sejahtera yang adaptif terhadap perkembangan zaman

7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Meskipun nilai SAKIP menunjukkan kategori baik, penguatan manajemen kinerja berbasis outcome dan dampak masih perlu ditingkatkan. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis digital menjadi kebutuhan strategis ke depan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penentuan prioritas kebijakan dan arah program tahun 2026, guna memastikan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Blitar berjalan secara efektif, berkelanjutan dan berkeadilan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



dp3ap2kb.blitarkota.go.id



dp3a-p2kb@blitarkota.go.id



Dinas P3AP2KB Kota Blitar



[@dp3ap2kb.kotablitar](https://www.tiktok.com/@dp3ap2kb.kotablitar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra PD memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Rencana Program jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra DP3AP2KB Kota Blitar periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan juga evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya. Selain itu juga identifikasi dan telaah dari RTRW.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2025, serta juga menyebutkan program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 2026

Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar termuat dalam Dokumen Renstra PD yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD, Visi dan Misi Pembangunan Kota Blitar dan bersifat indikatif.

Visi Pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada tahun 2021-2026 adalah : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat lima misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- III. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
- IV. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- V. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Berpedoman pada visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025 dan RPJMD tahun 2021-2026 tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar menetapkan Rencana Strategis 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan DP3AP2KB Kota Blitar lima tahun kedepan, sehingga terwujud pembangunan yang berkesinambungan sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Dinas P3AP2KB Kota Blitar mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka tujuan Renstra Dinas P3AP2KB mengacu pada 2 (Dua) misi Kota Blitar yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Berdasarkan dua misi tersebut, ditetapkan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB yang menjadi tugas dan fungsi

Dinas P3AP2KB, sebagai berikut :

Tabel II. 1
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
DP3AP2KB KOTA BLITAR

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Meningkatnya pemberdayaan gender	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
				Peningkatan kapasitas perempuan
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
			Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan partisipasi Peserta KB aktif
				Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB
				Pengendalian usia perkawinan di Bawah umur (15-19 tahun)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen antara Kepala Dinas dengan Wali Kota untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja memuat :

- Sasaran strategis
- Indikator sasaran/kinerja
- Target kinerja
- Program dan anggaran yang mendukung

Adapun Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2
Target Kinerja Sasaran Strategis DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,50
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100 %
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 %
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,34)

Untuk melaksanakan sasaran strategis diatas, DP3AP2KB Kota Blitar didukung 8 program dengan anggaran pada P-APBD tahun 2025 sebesar Rp. 8.708.917.614,00 (Delapan milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian per program adalah sebagai berikut :

Tabel II. 3
Anggaran per Program DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.699.278.511,00
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 786.109.200,00
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 154.872.409,00
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 105.204.055,00
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 215.210.923,00
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 218.275.629,00
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 1.296.710.800,00
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.233.256.087,00
	Total	Rp. 8.708.917.614,00

Program-program tersebut dirancang selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama tahun 2025.

Melalui Perjanjian Kinerja tersebut, setiap unit kerja di lingkungan dinas memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perencanaan dan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien

dan berorientasi pada hasil (outcome) serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Blitar

C. PROGRES TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKjIP TAHUN 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel II.4
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP DP3AP2KB Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah; dan adanya kesenjangan ekonomi- pendapatan (Banyak perempuan bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap dan tidak terukur, sehingga menurunkan angka sumbangan pendapatan perempuan dalam data statistik	Mengadakan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	√		Pada tahun 2025 telah dilakukan: - Pelatihan makanan olahan - Workshop IT bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) - Sekolah Perempuan (SEKOPER)

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
2	a) Masih adanya perangkat daerah yang belum memahami tentang Pengarusutamaan Gender b) Perangkat Daerah sudah melakukan penyusunan PPRG tetapi nominal/target anggaran yang dianalisa belum optimal	Sosialisasi kepada Perangkat Daerah Bimtek Penyusunan PPRG	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a - Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kot a	√		Tahun 2025 sudah dilaksanakan - Sosialisasi PUG pada organisasi dan lembaga kemasyarakatan - Bimtek PPRG - Fasilitasi penguatan kelembagaan APE - Fasilitasi DKRPPA (papan data)
3	a. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Penanganan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai SOP	- Program Perlindungan Perempuan - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah - Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan : - Pertemuan Satgas PPA dan sosialisasi bila menemui kasus kekerasan di masyarakat - Untuk layanan kasus kekerasan di UPT PPA terdapat pada kegiatan

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a			Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota dengan sub kegiatan : 1. Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota 2. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	b. Pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan	c. Pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan	- Program Perlindungan Perempuan - Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan : Sosialisasi pencegahan pencegahan KtP/TPPO/KD RT
4	Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Pelayanan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak sesuai SOP	- Program Perlindungan Khusus Anak - Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan	√		Pada tahun 2025 telah disediakan anggaran untuk biaya operasional UPT PPA. Selain itu juga disediakan anggaran untuk sarana prasarana layanan UPT di sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			layanan AMPK			Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota
		b. Peningkatan kualitas SDM di Bidang Perlindungan Anak	- Program Perlindungan Khusus Anak - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kab/Kota	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan : - Workshop KHA - Pembinaan Kelompok PATBM di kelurahan

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		c. Memberikan sosialisasi kepada Anak/masyarakat	- Program Perlindungan Khusus Anak - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah/Kab/Kota - Sub Kegiatan Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kab/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DKRPPA	√		Tahun 2025 telah dilaksanakan sosialisasi PPA di sekolah dan di masyarakat
5	TFR	Diperlukan Inovasi dalam meningkatkan kerjasama dengan institusi sekolah	- Program Pengendalian Penduduk - Kegiatan Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan inovasi Workshop Sekolah Siaga Kependudukan

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			pengendalian Penduduk - Sub kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal			
		b. Peningkatan Kapasitas Kader dalam program KB khususnya tentang metode penggerakan masyarakat dan pengetahuan kontrasepsi terkini	- Program Pembinaan Keluarga Berencana - Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan : - Rakor untuk Kader IMP - Rakor Kelompok Kegiatan (Poktan) - Pemberian jasa pelayanan untuk kader IMP

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		c. Refreshing Penyuluh KB dan kader terkait kontrasepsi dan penggerakan masyarakat untuk ber-KB	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera - Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Sub kegiatan Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kad er Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan : - Workshop pendidikan teman sebaya - Rakor Saka Kencana

Dari tabel diatas dapat diketahui kalau Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam LKj IP 2024, progresnya sudah ditindaklanjuti semua.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



dp3ap2kb.blitarkota.go.id



dp3a-p2kb@blitarkota.go.id



Dinas P3AP2KB Kota Blitar



[@dp3ap2kb.kotablitar](https://www.tiktok.com/@dp3ap2kb.kotablitar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam implementasi sistem AKIP, Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024), serta realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA 2021-2026. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja dengan kriteria, yaitu :

Tabel III. 1
Skala Pengukuran Kinerja Sasaran

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA		PREDIKAT
	%	KETERANGAN PROSENTASE	
1	85 % - 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

Pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2025 menggunakan metode seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel III.2 berikut.

Tabel III.2
Pencapaian Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Predikat
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,50	68,40 *	90,60%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Berhasil
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Sangat Berhasil
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Sangat Berhasil
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94	1,89	102,57%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,34)	A (85,50)	100,19 %	Sangat Berhasil

Catatan * : Realisasi IDG adalah realisasi tahun 2024

Penjabaran analisis pencapaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Target tahun 2025 IDG yang merupakan tujuan Dinas P3AP2KB yaitu 75,50. IDG dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar. Untuk realisasi tahun 2025, akan dirilis pada Bulan Mei 2026 sehingga realisasi yang dicantumkan yaitu realisasi tahun 2024.

Permasalahan/Kendala :

Realisasi IDG belum optimal disebabkan oleh :

1. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan jabatan pengambil keputusan
2. Partisipasi/Pemberdayaan ekonomi perempuan yang berbasis kewirausahaan dan UMKM masih terbatas

3. Belum optimalnya akses perempuan pada posisi strategis

Secara umum, IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) mulai dianggap kurang relevan sebagai indikator kinerja utama karena Cakupan Indikator Terlalu Sempit. IDG hanya mengukur tiga aspek utama:

- keterwakilan perempuan di parlemen,
- proporsi perempuan sebagai tenaga profesional/teknis,
- kontribusi pendapatan perempuan

Pada hal pemberdayaan gender jauh lebih luas, mencakup:

- akses pendidikan,
- kesehatan reproduksi,
- partisipasi ekonomi informal,
- kepemimpinan di sektor privat,
- pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Karena ruang lingkupnya terbatas, IDG tidak mampu menggambarkan pemberdayaan perempuan secara komprehensif.

Tindak lanjut/action plan :

- a) Pada Renstra 2025-2030 Dinas P3AP2KB Kota Blitar sudah tidak menggunakan IDG sebagai indikator kinerja, tetapi menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

2) Persentase Kelembagaan PUG aktif

Capaian sebesar 100,00% dengan predikat **Sangat berhasil**

Formulasi penghitungan indikator sasaran *Kelembagaan PUG yang aktif* adalah Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG dibagi jumlah lembaga yang ada di Kota Blitar di kali 100%. Persentase Kelembagaan PUG yang aktif pada tahun 2025 ini sebesar 100,00% dengan persentase capaian 100,00% dengan kategori Sangat berhasil. Capaian 100% ini menunjukkan kalau seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Blitar sudah membentuk Pokja PUG dan melaksanakan perencanaan responsif gender

**3 (tiga) prasyarat utama dalam implementasi Pengarusutamaan
Gender (PUG) :**

Komponen/ Indikator		Permasalahan	Faktor Pendukung	Rencana Tindak Lanjut
Komitmen	Regulasi PUG	Regulasi sudah ada namun belum menjadi rujukan operasional seluruh OPD.	Perda/RAD PUG tersedia	Sosialisasi teknis regulasi dan integrasi kewajiban PUG dalam pedoman OPD
	Integrasi Kebijakan	Perspektif gender belum menjadi indikator kinerja OPD.	RPJMD mendukung	Integrasi indikator gender dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja OPD
Kelembagaan	Rencana Aksi Daerah	RAD PUG yang ada (2023-2026) disusun sebelum revitalisasi sehingga masih menggunakan 7 prasyarat dan 9 proses pembangunan	Peraturan Walikota no. 15 Tahun 2024 yang sudah mengikuti revitalisasi	Penyesuaian RAD PUG tahun berikutnya sesuai dengan revitalisasi
	Focal Point	Pergantian personil menurunkan kapasitas PUG	Focal point tersedia	Orientasi dan mentoring focal point baru
SDM & Data Terpilih	SDM	Sumber daya manusia yang terlibat dan terdokumentasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender saat ini masih terbatas pada aparatur di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar, sementara sumber daya manusia dari Aparat Penegak Hukum	1. Tersedianya fasilitator PUG 2. Sistem penganggaran berjalan	Integrasi ARG sejak tahap perencanaan

Komponen/ Indikator		Permasalahan	Faktor Pendukung	Rencana Tindak Lanjut
		(APH) belum terdata		
	Data Terpilah	Standar data gender belum seragam dan sepenuhnya terpilah gender	Tersedianya data sektoral terpilah gender (A-Data & Simpedak)	Standarisasi metadata data terpilah

7 (tujuh) proses pembangunan

Komponen/ Indikator		Permasalahan	Faktor Pendukung	Rencana Tindak Lanjut
PERENCANAAN	Penetapan Program	Program belum selalu berbasis isu gender daerah.	RAD PUG tersedia	Penyelarasan isu gender dengan prioritas pembangunan
PENGANGGARAN	ARG	1. ARG belum dipahami sebagai alat peningkatan kualitas program 2. ARG belum digunakan sebagai dasar keputusan program.	1. Tersedianya fasilitator PUG 2. Sistem penganggaran berjalan 3. Adanya Regulasi ARG	1. Integrasi ARG sejak tahap perencanaan 2. Pendampingan penyusunan GAP berbasis program

Komponen/ Indikator		Permasalahan	Faktor Pendukung	Rencana Tindak Lanjut
		Dampak anggaran terhadap gender belum diukur.	Dukungan Bappeda dan BPKAD	Penyusunan indikator manfaat gender
PELAKSANAAN	Implementasi	1. Program belum memastikan akses setara kelompok rentan 2. Penentuan sasaran belum berbasis data gender 3. Kemitraan belum terdokumentasi sistematis	1. Banyak inovasi daerah 2. tersedianya sistem data sektoral 3. Adanya komunitas dengan sasaran kelompok rentan yang aktif	1. Pembuatan Standar layanan inklusif OPD 2. Penetapan target berbasis kelompok rentan 3. SOP kolaborasi masyarakat & dunia usaha
PEMANTAUAN	Monitoring	Pemantauan fokus pada serapan anggaran, bukan dampak gender.	Desk PUG berjalan	Instrumen monitoring indikator gender
	Feedback	Hasil monitoring belum menjadi rekomendasi kebijakan.	Adanya Pokja PUG	Integrasi hasil monitoring ke perencanaan berikutnya
EVALUASI	Indeks PUG	OPD belum memahami kontribusi terhadap IPG/IKG.	Data statistik tersedia	Forum analisis indikator gender
PENGAWASAN	Kepatuhan	Belum ada ukuran kepatuhan PUG OPD.	Regulasi tersedia	Penilaian kepatuhan implementasi PUG
	Pengendalian Risiko	Risiko bias gender belum diidentifikasi.	Adanya Sistem pengawasan	Checklist pengawasan responsif gender

Komponen/ Indikator		Permasalahan	Faktor Pendukung	Rencana Tindak Lanjut
PELAPO RAN	Konsolidasi	Data lintas OPD sulit dihimpun.	Adanya Pokja PUG	Dashboard pelaporan terpadu
	Pelaporan PPE	Bukti dukung tersebar di berbagai sumber.	Terselenggaranya PPE	Bank data digital PUG
	Publikasi	Informasi gender belum rutin dipublikasikan.	Website pemerintah daerah tersedia	Publikasi statistik gender berkala

3) Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan;

Memperoleh capaian sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**

Formulasi penghitungan indikator sasaran *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan* adalah persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus perempuan yang dilaporkan. Pada indikator kinerja *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan* terealisasi 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100% dengan kategori Sangat berhasil dimana hal ini menunjukkan seluruh kasus yang dilaporkan telah ditangani melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, koordinasi lintas sektor.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan di Kota Blitar ada 25 orang, sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Kota Blitar berjumlah 25 orang.



Isu	Permasalahan (Detail)	Faktor Pendukung	Rencana Tindak Lanjut
Tren Kasus Kekerasan	Peningkatan angka kekerasan di tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menekan faktor risiko di tingkat keluarga dan sosial	Sistem layanan perlindungan sudah berjalan dan seluruh kasus mendapat pendampingan	Penguatan strategi pencegahan berbasis keluarga dan komunitas melalui pendekatan preventif berkelanjutan
Pencegahan Berbasis Edukasi	Sosialisasi masih bersifat kegiatan periodik, belum menjadi gerakan sosial berkelanjutan	Adanya Sosialisasi UU TPKS setiap tahun	Program edukasi berjenjang mulai sekolah, keluarga, hingga komunitas
Kelompok Rentan	Perempuan disabilitas dan kelompok rentan membutuhkan pendekatan layanan khusus	Adanya UPT PPA	Penetapan Standarisasi layanan inklusif berbasis kebutuhan khusus
Data dan Monitoring Kasus	Data kasus belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar intervensi kebijakan preventif	Sistem pencatatan kasus tersedia (SIMFONI)	Analisis tren kasus tahunan sebagai dasar kebijakan PUG dan perlindungan

Isu	Permasalahan (Detail)	Faktor Pendukung	Rencana Tindak Lanjut
Koordinasi Lintas Sektor	Keterlibatan lintas sektor belum sepenuhnya sistematis terutama unsur non-pemerintah dan APH (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan layanan kesehatan)	Satgas PPA dan sinergi dengan OPD sudah ada	Penguatan jejaring perlindungan perempuan berbasis multipihak

4) **Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan;**

Memperoleh capaian sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**

Formulasi penghitungan indikator sasaran *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak* adalah persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Pada indikator kinerja *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan* terealisasi 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100% dengan kategori Sangat berhasil.

Dalam penguatan sistem perlindungan anak, pemenuhan hak anak sangat penting. Hal ini membutuhkan upaya perwujudan lingkungan yang aman dan ramah anak. Maka dari itu sinergi lintas sektor, peningkatan peran keluarga serta mekanisme perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum maupun korban kekerasan sangat diperlukan.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan di Kota Blitar pada tahun 2025 sebanyak 54 orang, sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Kota Blitar berjumlah 54 orang.



Faktor pendukung :

- Alokasi anggaran yang cukup dan adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada anak
- Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar instansi dan lembaga terkait perlindungan anak
- Adanya partisipasi aktif dari masyarakat (keluarga atau lingkungan) dalam melindungi anak dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Kendala/permasalahan :

Layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum optimal yang dikarenakan :

- SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap anak hanya Ka. UPT PPA tidak ada JF/ pelaksana sehingga selama ini untuk penanganan/pendampingan kasus dibantu oleh Tim Kerja UPT PPA
- Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum mampu menekan faktor risiko di tingkat keluarga atau sekolah.

Tindak lanjut :

- Terkait SDM maka segera membuat laporan ke Walikota Blitar tembusan BKPSM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar kalau tenaga UPT PPA tentang penambahan personil UPT PPA karena saat ini hanya tersedia Ka.UPT saja, tidak ada JF ataupun pelaksana.
- Terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, maka akan

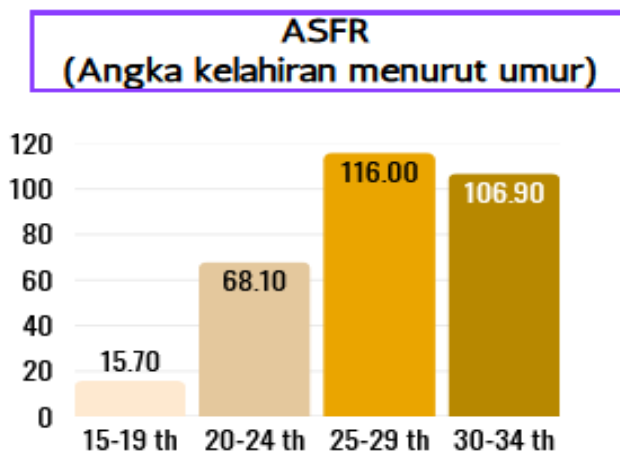
dilakukan edukasi dan sosialisasi Perlindungan Anak di sekolah

5) **Total Fertility Rate (TFR);**

TFR dari target 1,94 tercapai 1,89 dimana ini menandakan capaian yang baik yaitu sebesar 102,57 % dengan predikat **sangat berhasil**. Formulasi penghitungan indikator sasaran *Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)* adalah Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya. Jadi semakin rendah TFR adalah semakin baik.

TFR 1,89 ini mempunyai arti bahwa di Kota Blitar rata-rata perempuan sejak masa usia subur sampai akhir masa reproduksi (usia 15-49 tahun) di Kota Blitar mempunyai anak 2 (dua). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka Jawa Timur yaitu 1,96. Artinya capaian TFR terkendali yang menunjukkan efektivitas program KB, namun keberlanjutan pelayanan kontrasepsi dan peningkatan kesertaan KB aktif harus menjadi prioritas.

TFR dihitung dengan menjumlahkan ASFR (Age Specific Rate atau Angka Kelahiran Spesifik Umur) dari kelompok usia 15-49 tahun.



Realisasi TFR menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian kelahiran. Hal ini mencerminkan :

- Tingkat kesertaan KB aktif yang stabil
- Akses pelayanan kontrasepsi yang memadai
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keluarga kecil

berkualitas

Peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.

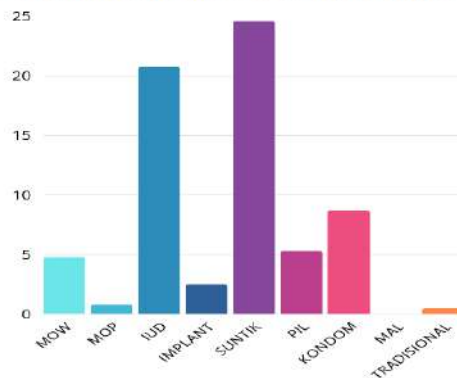
Tabel. III. Pasangan Usia Subur (PUS) dan Pencapaian Peserta KB Aktif Menurut Kelurahan di Kota Blitar, 2025

Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Pencapaian Peserta KB Aktif	Persentase Terhadap Pasangan Usia Subur
Sukorejo	7,157	5348	74.72
01. Tlumpu	563	488	86.68
02. Karang Sari	677	502	74.15
03. Turi	562	406	72.24
04. Blitar	661	479	72.47
05. Sukorejo	1711	1173	68.56
06. Pakunden	1,621	1234	76.13
07. Tanjungsari	1,362	1066	78.27
Kepanjenkidul	5,332	3954	74.16
01. Kepanjenkidul	716	539	76.25
02. Kepanjenlor	452	305	69.69
03. Kauman	750	507	68.93
04. Bendo	786	510	66.15
05. Tanggung	1013	782	78.47
06. Sentul	1131	842	75.59
07. Ngadirejo	484	469	78.30
Sananwetan	7,817	4715	60.32
01. Rembang	422	252	59.72
02. Klampok	733	458	62.48

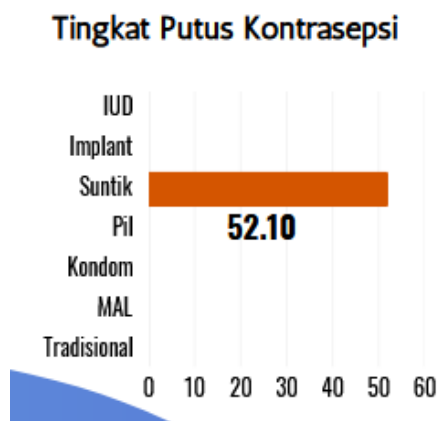
Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Pencapaian Peserta KB Aktif	Persentase Terhadap Pasangan Usia Subur
03. Plosokerep	705	444	62.98
04. Karangtengah	1,054	674	63.95
05. Sananwetan	1784	1088	60.99
06. Bendogerit	1,252	727	58.07
07. Gedog	1,867	1072	57.42
Kota Blitar	20,306	14017	69.03

Untuk persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR di Kota Blitar sebesar 67,4% dan Contraceptive Prevalence Rate/CPR Kota Blitar sebesar 67,9% dimana jumlah peserta KB aktif modern sebanyak 13.690 dan jumlah pasangan usia subur sebanyak 20.306. Metode kontrasepsi modern ini meliputi pil, suntik, implan, kondom, KB spiral, vasektomi dan tubektomi.

Penggunaan Metode Kontrasepsi



Tingkat putus penggunaan metode kontrasepsi selama tahun 2025 yang terbanyak adalah akseptor dengan menggunakan metode Suntik sebanyak 52.10, sedangkan metode kontrasepsi lain adalah 0 (nol)



Faktor pendukung :

- Adanya komitmen dari pemerintah terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana; fasilitas pelayanan KB
- Peningkatan/kemudahan akses layanan kesehatan dan kesehatan reproduksi
- Dukungan/komitmen dari Pasangan Usia Subur dalam mendukung program KB atau perencanaan keluarga

Kendala/permasalahan :

- Masih minimnya pengetahuan, motivasi dan partisipasi Pasangan Usia Subur dalam Program Bangga Kencana
- Dinamika struktur penduduk (bonus demografi) memerlukan penguatan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja
- Belum optimalnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan keluarga sehingga perlu diperkuat melalui edukasi pengasuhan dan perencanaan keluarga

Tindak lanjut/action plan :

- Meningkatkan kapasitas kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) yang sangat krusial dalam menurunkan TFR karena mereka sebagai ujung tombak penggerak Program Bangga Kencana di tingkat kelurahan/basis (penyuluhan kepada PUS tentang akses dan partisipasi KB, perkawinan usia anak, konseling KB)
- Menyusun perencanaan terintegrasi serta evaluasi berbasis data (seperti indikator Bangga Kencana dalam SIPERINDU) untuk memastikan kualitas angkatan kerja supaya bonus demografi

berubah menjadi pertumbuhan ekonomi bukan beban sosial akibat pengangguran

6) **Nilai SAKIP Perangkat Daerah;**

Memperoleh capaian sebesar 102,74 dengan predikat **sangat berhasil**

Keterangan :

- Pada indikator kinerja sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* terealisasi dengan kategori A (85,50) dari target A (85,34) dengan persentase capaian 100,19% dengan kategori Sangat berhasil.
- Meskipun nilai SAKIP menunjukkan kategori Baik, penguatan manajemen berbasis outcome dan dampak masih perlu ditingkatkan. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis digital menjadi kebutuhan strategis ke depan

HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR				
NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	TOTAL NILAI
A	PERENCANAAN KINERJA	30%	26.16	85.50
B	PENGUKURAN KINERJA	30%	24.60	
C	PELAPORAN KINERJA	15%	14.11	

D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25%	20.63	
---	---	-----	-------	--

Adapun permasalahan, rencana tindak lanjut dalam implementasi SAKIP seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan

Nomor LHP : 700.1.2.9/ 845 /410.050/2025

Tanggal LHP : 2025-09-18

OPD : DP3AP2KB Kota Blitar

Objek Pemeriksaan : Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2025 pada DP3AP2KB

Jenis Pemeriksaan : Evaluasi

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status		
					Nilai	TL	Ket.
1.	Analisa atas faktor pendukung dan penghambat pada monev rencana aksi jabatan administrator dan pengawas tribulan I tahun 2025 belum disertai factor pendukung dan penghambat serta rekomendasi atau rencana perbaikan	Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar agar : Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi serta melakukan follow up atas saran yang telah diberikan	Monev Renaksi dan Monev RKPD yang disertai analisa faktor pendorong dan penghambat serta rekomendasi	Monev Renaksi dan Monev RKPD Tribulan IV 2025	0	P	Proses
2.	Perumusan sasaran pada Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya berorientasi outcome pada level kinerja	Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh bidang untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih	a. Pohon Kinerja 2026 b. Renja 2026 c. PK JPT Pratama, Administrator dan	Pohon Kinerja 2026, Renja 2026		P	Proses

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut Pengawas 2026	Tindak Lanjut	Status		
					Nilai	TL	Ket.
	jabatan administrator (2.02.01), yaitu: a) Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang efektif dan efisien b) Terlaksananya pemenuhan hak anak secara efektif dan efisien c) Terlaksananya pengendalian penduduk yang efektif dan efisien d) Terlaksananya pembinaan keluarga berencana kepada pasangan usia subur dan peserta KB yang aktif e) Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan keluarga yang berkualitas	berorientasi outcome pada level kinerjanya dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat relevan dan memberikan continuous improvement pada pencapaian kinerja yang ditetapkan					
3.	Reviu atas laporan kinerja belum didokumentasikan	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan reviu laporan kinerja	Dokumen reviu laporan kinerja			B	Belum di Proses
4.	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja karena belum sepenuhnya	Ke depan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025		S	Selesai

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status		
					Nilai	TL	Ket.
	menunjukkan perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terutama pada indikator (2.01.01): a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 99.65% menjadi 91.15% b) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari 102.75% menjadi 100.40%						

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel III.3 berikut.

Tabel III.4
Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja
DP3AP2KB KOTA BLITAR TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	90,60%*	V			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	V			
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00 %	V			
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00 %	V			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	102,57%	V			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,19 %	V			
Rata-rata keberhasilan capaian sasaran strategis		98,89 %	Sangat Berhasil			

Catatan * : Capaian IDG 2025 masih menggunakan realisasi tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Dinas P3AP2KB ini rata - ratanya 98,89% dengan predikat Sangat Berhasil.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 – 2025

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2025
DP3AP2KB KOTA BLITAR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,87	74,20	75,50	67,63	68,40	68,40 *	99,65 %	92,18%	90,60%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	47,28 %	100,0 0%	100,0 0%	63,3%	100,0 0%	100,0 0%	133,8 8%	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,00 %	100,00 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,13	1,91	1,94	1,94	1,93	1,89	109,86%	101,55%	102,65%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	85,28	85,34	85,28	85,66	85,50	102,74%	100,39%	100,19%

Untuk indikator yang sama antara tahun 2023 sampai 2025 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas P3AP2KB sudah bisa mencapai target bahkan ada yang lebih dari 100%.

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tahun 2023 :

- Hampir mencapai target : selisih hanya -0.24 poin
- Capaian sangat tinggi (99,6%) menunjukkan strategi dan implementasi pada tahun ini efektif
- Kinerja relatif lebih baik dengan sedikit kekurangan

Tahun 2024 :

- Penurunan signifikan dalam pencapaian target dibanding tahun 2023
- GAP mencapai -5,80 poin (capaian 92,2%)
- Menunjukkan tantangan baru atau hambatan implementasi yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya

Tahun 2025 :

- Target meningkat lagi dibanding tahun 2024 menjadi 75,50
- Realisasi sementara belum dirilis oleh BPS, maka menggunakan realisasi tahun 2024 sehingga gap semakin

besar dibanding tahun sebelumnya
Kinerja IDG cenderung menurun bila dibandingkan targetnya, sehingga dibutuhkan evaluasi strategi pencapaian agar realisasi dapat meningkat sejalan dengan target

2. Persentase kelembagaan PUG aktif

Tahun 2023 :

- Realisasi 63,3 jauh melebihi target 47,28
- Capaian 134,0% menunjukkan kelembagaan PUG aktif jauh lebih banyak dari target yang ditetapkan
- Ini menunjukkan upaya pengarusutamaan gender berhasil berkembang dengan baik di tahun 2023
- Hal ini menunjukkan indikasi yang positif (komitmen kuat dari pemangku wilayah; sosialisasi dari pendampingan telah efektif; kelembagaan tumbuh melebihi ekspektasi

Tahun 2024 :

- Target 100% realisasi 100%, merupakan capaian yang sempurna 100%
- Semua sasaran kelembagaan PUG aktif telah terpenuhi 100%, artinya baik indikator maupun target sudah optimal dan tercapai penuh

Tahun 2025 :

- Target dan realisasi masih sama yaitu 100%
- Capaian tetap 100%, stabil dari tahun sebelumnya

Tren keseluruhan sangat positif, dari pencapaian diatas target menjadi pencapaian optimal 100% dan bertahan.

Strategi/Rencana Tindak Lanjut :

- Peran aktif dalam program dan kebijakan
- Pertahankan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan 100% kelembagaan PUG yang aktif

3. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan

Konsistensi capaian maksimal, selama tiga tahun berturut-turut realisasi selalu 100% sesuai target artinya :

- Seluruh kasus yang tercatat berhasil ditangani/diselesaikan
- Tidak terdapat backlog kasus pada akhir tahun pelaporan
- Mekanisme layanan berjalan efektif

Tren 2023-2025 menunjukkan :

- Tidak ada fluktuasi
- Tidak ada gap antara target dan realisasi
- indikator bersifat maintenance (mempertahankan kinerja maksimal) bukan lagi peningkatan kuantitatif)

Faktor pendukung :

- Keberadaan UPT PPA yang aktif dan responsif
- Adanya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan OPD
- Koordinasi lintas sektor yang efektif
- Peningkatan kapasitas SDM
- Alokasi anggaran untuk operasional penanganan kasus

Strategi/Rencana Tindak Lanjut :

- Peningkatan kualitas layanan
- Pencegahan kasus
- Penguatan rehabilitasi korban
- Integrasi data dan monitoring berkelanjutan

4. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan

Capaian 100% menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam sistem layanan telah diselesaikan sesuai mekanisme penanganan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan :

- Sistem layanan pengaduan dan rujukan berjalan efektif
- Koordinasi lintas sektor (UPT PPA, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, RSUD, Puskesmas) berjalan baik
- Pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban

terlaksana sesuai standar pelayanan

- Tidak terdapat sisa kasus (backlog) pada akhir tahun pelaporan

Faktor pendukung :

- Keberadaan UPT PPA yang aktif
- SOP penanganan kasus yang jelas dan standar
- Peningkatan kapasitas pendamping
- Jejaring layanan yang responsif
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyelesaian kasus

Strategi :

- Peningkatan kualitas layanan
- Penguatan sistem pencegahan
- Integrasi data dan respon cepat
- Peningkatan kepuasan korban dan keluarga

5. Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)

Tahun 2023 :

Realisasi TFR sebesar 1,94 lebih rendah dibanding target 2,13. Dalam konteks pengendalian penduduk, capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka kelahiran hingga dibawah proyeksi yang ditetapkan.

Tahun 2024 :

Realisasi sebesar 1,93 sedikit lebih tinggi dari target 1,91 (selisih 0,02) meskipun terdapat deviasi tipis, angka ini masih berada dalam kategori terkendali dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan.

Tahun 2025 :

Realisasi kembali lebih rendah dari target (1,89 dibanding 1,94). Hal ini menunjukkan penurunan fertilitas yang relatif stabil.

Secara umum, capaian TFR selama periode 2023-2025 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dan menurun secara

gradual dari 1,94 (2023) menjadi 1,89 (2025). Hal ini mengindikasikan bahwa program pengendalian penduduk dan KB berjalan efektif dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Namun demikian, TFR yang terlalu rendah dalam jangka panjang juga dapat berdampak pada :

- Penuaan struktur penduduk
- penurunan proporsi usia produktif di masa depan
- Tantangan bonus demografi

Faktor pendukung :

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB
- Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
- Edukasi kesehatan reproduksi
- Peran aktif kader dan penyuluh KB
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga

Strategi / Rencana Tindak Lanjut :

- Edukasi kesehatan reproduksi
- Pencegahan perkawinan anak
- Peningkatan pelayanan KB berkualitas
- Monitoring berkelanjutan penggunaan kontrasepsi

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Secara umum, capaian Nilai SAKIP periode 2023-2025 menunjukkan tren positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 :

Realisasi sebesar 85,28 melampaui target 83 dengan selisih 2,28 poin. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tahun 2024 :

Realisasi meningkat menjadi 85,66, kembali melampaui target

sebesar 85,28. Meskipun selisih tidak sebesar tahun sebelumnya, kinerja tetap menunjukkan perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2025 :

Realisasi sebesar 85,50 juga melampaui target 85,34. Walaupun terjadi sedikit penurunan dibanding tahun 2024, nilai tetap berada diatas target dan dalam kategori sangat baik.

Nilai SAKIP menunjukkan konsistensi diatas target selama tiga tahun berturut-turut.

Faktor pendukung :

- Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja)
- Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja
- Sinergi antar bidang dalam pencapaian indikator kinerja utama

Stabilitas nilai diatas 85 menandakan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan efektif dan terintegrasi.

Strategi / Rencana Tindak Lanjut :

- Mendorong inovasi peningkatan kualitas kinerja
- Memperkokoh outcome-based performance
- Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA

Perbandingan ini bertujuan untuk melihat posisi capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, sehingga dapat diketahui tingkat progres pencapaian sasaran strategis jangka menengah.

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2021-2026
DP3AP2KB Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,59	68,40*	89.31%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	100,00%	100,00 %
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00 %
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94	1,89	102.65 %
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,36	85,50	100,16 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Realisasi 68,4* adalah realisasi IDG di tahun 2024 karena untuk realisasi 2025 belum dirilis oleh BPS Kota Blitar. Hal ini bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 76.59 menunjukkan kemajuan sebesar 89,31%. Hal ini menandakan masih terdapat gap sebesar 8.19 poin yang perlu dikejar pada periode perencanaan berikutnya. Penguatan keterwakilan perempuan dan partisipasi ekonomi menjadi strategi utama percepatan.

2. Persentase Kelembagaan PUG aktif

Capaian telah memenuhi target akhir Renstra (100%). Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan terhadap integrasi perspektif

gender telah terwujud secara menyeluruh di perangkat daerah

3. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan

Realisasi telah mencapai 100% sesuai target akhir Renstra. Artinya dari sisi indikator penyelesaian kasus, kinerja telah optimal. Tantangan berikutnya adalah penguatan aspek pencegahan dan penurunan jumlah kasus

4. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan

Realisasi telah mencapai 100% sesuai target akhir Renstra. Artinya dari sisi indikator penyelesaian kasus, kinerja telah optimal. Tantangan berikutnya adalah penguatan aspek pencegahan dan penurunan jumlah kasus

5. Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)

Realisasi 1.89 lebih baik dari target akhir Renstra 1.94. Hal ini menunjukkan pengendalian penduduk berjalan efektif dan telah melampaui target jangka menengah

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai 85.50 melampaui target akhir Renstra 85.36. Ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan konsistensi manajemen kinerja berbasis hasil.

Kesimpulan Perbandingan

Secara umum hingga akhir tahun 2025 :

- Lima indikator telah mencapai atau melampaui target akhir Renstra (PUG, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, penyelesaian kasus terhadap anak, TFR dan Nilai SAKIP)
- Satu indikator strategis yaitu IDG masih belum mencapai target akhir Renstra dan memerlukan strategi akselerasi pada periode perencanaan berikutnya

Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah secara keseluruhan berada pada jalur yang baik, dengan fokus perbaikan utama

pada peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan untuk mencapai target pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka pada tahun 2025 DP3AP2KB Kota Blitar tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian DP3AP2KB Kota Blitar berusaha untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan DP3AP2KB Kabupaten/Kota lainnya atau Tingkat Provinsi, Nasional dengan perolehan data sebagaimana tabel dibawah ini.

Perbandingan ini dilakukan untuk melihat posisi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam konteks Nasional, Provinsi dan daerah sekitar sebagai tolok ukur (benchmarking).

Tabel III. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah Dengan Kab/Kota Lain Tahun 2025

Kinerja	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja			
		Nasiona 1	Provinsi	DP3AP2KB Kab. Blitar	DP3AP2 KB Kota Blitar
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,62*	75,32*	79,86*	68,40*

Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	-	-	-	100 %
Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	-	-	100%	100 %
	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	-	-	100%	100 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	TFR (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan ibu selama masa reproduksi)	2,12	1,96	2,00	1,89
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	67,80	85,50

Catatan * : IDG adalah realisasi tahun 2024)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian IDG Kota Blitar sebesar 68.4* (capaian tahun 2024 karena tahun 2025 belum rilis oleh BPS) masih berada dibawah capaian nasional (77.62*), Provinsi (75.32*) maupun Kabupaten Blitar (79.86*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di Kota Blitar masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek keterwakilan politik dan partisipasi ekonomi perempuan.

2) Pelaksanaan PUG dan Penyelesaian Kasus Kekerasan

Persentase kelembagaan PUG dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mencapai 100% sejajar dengan capaian Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam integrasi perspektif gender dan pelayanan perlindungan korban.

3) Total Fertility Rate (TFR)

Realisasi TFR Kota Blitar sebesar 1.89 lebih baik (lebih rendah) dibandingkan dengan :

Nasional : 2,12

Provinsi : 1,96

Kabupaten Blitar : 2.00

Hal ini menunjukkan keberhasilan pengendalian penduduk dan efektivitas program keluarga berencana di Kota Blitar

4) Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kota Blitar sebesar 85.50 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Blitar (67,80). Hal ini menunjukkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Kota Blitar berada pada kategori sangat baik.

Kesimpulan :

1. Dalam aspek pengendalian penduduk (TFR) dan akuntabilitas kinerja (SAKIP), Kota Blitar menunjukkan capaian yang sangat baik dan lebih unggul dibandingkan daerah pembanding
2. Dalam aspek perlindungan perempuan dan anak, capaian telah optimal dengan penyelesaian kasus 100%
3. Tantangan utama terletak pada peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih berada dibawah capaian Nasional dan Provinsi.

Hasil perbandingan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada periode perencanaan berikutnya, agar posisi Kota Blitar semakin kompetitif dan setara dengan capaian Nasional maupun daerah lain.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan prinsip value for money dengan mengedepankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada

tahun 2025, jumlah anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Persentase Realisasi Anggaran Sesuai Jenis Belanja

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Belanja Operasi	8.620.218.714,00	8.037.553.100,00	93,24
2	Belanja Modal	88.698.900,00	86.102.410,00	97,07
JUMLAH		8.708.917.614,00	8.123.655.510,00	93,28

Adapun untuk anggaran dan realisasi belanja per program / kegiatan tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.9
Persentase Realisasi Anggaran Per Urusan

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.960.675.098,00	5.754.902.976,00	96,55
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.748.242.516,00	2.368.752.534,00	86,19
JUMLAH		8.708.917.614,00	8.123.655.510,00	93,28

Tabel III.10
Persentase Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.699.278.511,00	4.581.192.603,00	97,49%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.674.800,00	9.808.721,00	91,89%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.300.000,00	3.225.000,00	97,73%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTA SE
		Rp	Rp	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.374.800,00	6.583.721,00	93,74%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.491.759.795,00	3.447.104.559,00	98,72%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.489.509.795,00	3.445.779.559,00	98,75%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.250.000,00	1.305.000,00	58,00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.633.900,00	103.354.400,00	99,73%
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.096.000,00	7.096.000,00	100,00%
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.537.900,00	96.258.400,00	99,71%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.841.500,00	164.722.620,00	92,11%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.571.000,00	8.571.000,00	100,00%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.094.600,00	21.583.009,00	97,68%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.413.000,00	8.215.915,00	66,19%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.425.000,00	9.800.000,00	94,00%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.994.300,00	17.678.715,00	98,25%
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.160.000,00	80,00%
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	93.466.290,00	93,47%
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.643.600,00	3.247.691,00	69,94%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.385.900,00	88.723.210,00	97,09%
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.385.900,00	88.723.210,00	97,09%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.387.360,00	312.746.695,00	94,95%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.568.360,00	65.548.146,00	84,50%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.629.000,00	246.010.549,00	98,16%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.595.256,00	454.732.398,00	92,13%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.699,256,00	84,775,819,00	72,55%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.896.000,00	31.443.379,00	85,22%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	342.000.000,00	336.513.200,00	98,40%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	786.109.200,00	761,209,879,00	96,83%
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	46.109.200,00	40.131.910,00	87,04%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	46109.200,00	40.131.910,00	87,04%
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	275.000.000,00	263.135.658,00	95,69%
a	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	165.000.000,00	154.132.770,00	93,52%
b	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	110.000.000,00	108.822.888,00	98,93%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	465.000.000,00	457.942.311,00	98,48%
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.887.510,00	99,84%
b	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	395.000.000,00	388.054.801,00	98,24%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	154.872.409,00	126.383.956,00	81,61%
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.664.700,00	42.623.304,00	99,90%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.664.700,00	42.623.304,00	99,90%
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.910.309,00	33.424.534,00	54,88%
a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.869.881,00	11.553.294,00	52,83%
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.040.428,00	28.871.240,00	56,02%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.297.400,00	50.336.118,00	98,13%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
a	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.013.800,00	4.815.500,00	96,04%
b	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.283.600,00	45.520.618,00	98,35%
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105.204.055,00	94.028.286,00	89,38%
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	21.194.000,00	20.103.192,00	94,85%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21.194.000,00	20.103.192,00	94,85%
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	84.010.055,00	73.925.094,00	88,00%
a	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.178.400,00	30.963.840,00	99,31%
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.831.655,00	42.961.254,00	81,32%
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	215.210.923,00	192.088.252,00	89,26%
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	110.995.719,00	99.088.290,00	89,27%
a	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	110.995.719,00	99.088.290,00	89,27%
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	38.525.504,00	31.889.963,00	82,78%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.233.000,00	9.980.320,00	88,85%
b	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	27.292.504,00	21.909.643,00	80,28%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.689.700,00	61.109.999,00	93,03%
a	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kab/Kota	65.689.700,00	61.109.999,00	93,03%

Tabel III.11

Persentase Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	218.275.629,00	185.194.792,00	84,84%
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	16.298.829,00	16.218.276,00	99,51%
a	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	16.298.829,00	16.218.276,00	99,51%
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	201.976.800,00	168.976.516,00	83,66%
a	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	59.501.247,00	99,17%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
b	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	47.076.800,00	45.994.323,00	97,70%
c	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.000.000,00	12.568.980,00	34,91%
d	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	17.500.000,00	17.011.966,00	97,21%
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.296.710.800,00	1.000.569.706,00	77,16%
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	492.200.000,00	339.962.700,00	69,07%
a	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	75.000.000,00	71.219.550,00	94,96%
b	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	67.200.000,00	66.707.750,00	99,27%
c	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	77.604.400,00	77,60%
d	Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	124.431.000,00	49,77%
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	422.730.800,00	418.373.000,00	98,97%
a	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	422.730.800,00	418.373.000,00	98,97%
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	336.980.000,00	204.021.006,00	60,54%
b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	288.672.000,00	165.659.506,00	57,39%
d	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.508.000,00	12.261.500,00	90,77%
e	Peningkatan Kesertaan KB Pria	3.480.000,000	2.610.000,000	75,00%
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	44.800.000,00	38.213.000,00	85,30%
b	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	44.800.000,00	38.213.000,00	85,30%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.233.256.087,00	1.182.988.036,00	95,92%
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	474.256.087,00	424.126.036,00	89,43%
a	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	130.000.000,00	104.994.889,00	80,77%
b	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	16.763.800,00	14.829.050,00	88,46%
c	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	298.692.287,00	289.307.097,00	96,86%
d	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000,00	14.995.000,00	52,07%
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	759.000.000,00	758.862.000,00	99,98%
a	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	345.000.000,00	344.862.000,00	99,96%
b	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	414.000.000,00	414.000.000,00	100,00%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 8.037.553.100,00 dari total anggaran Rp 8.620.218.714,00 atau sebesar 93,24%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025 termasuk tinggi. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efektif.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Alokasi anggaran per sasaran pembangunan menggambarkan dukungan pembiayaan terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025. Pengelompokan ini menunjukkan keterkaitan antara perencanaan kinerja dengan penganggaran berbasis hasil (performance based budgeting).

Tabel III. 12

Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan DP3AP2KB Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	786.109.200,00	9,03
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	154.872.409,00	1,78
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	320.414.978,00	3,68
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2.748.242.516,00	31,56
4	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.669.278.511,00	53,96
Total Anggaran			8.708.917.614,00	100,00

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

- Meningkatnya pemberdayaan perempuan dengan indikator *Persentase Kelembagaan PUG Aktif***

Mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 786.109.200,00 dari anggaran dinas Rp. **8.708.917.614,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 1 adalah 9,03 % dari seluruh anggaran dinas.

Sasaran ini didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta sebagian dukungan dari Program

penunjang. Realisasi Anggaran Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan : 96,83%. Alokasi pada sasaran ini diarahkan untuk :

- Penguatan kelembagaan PUG
- Penyusunan ARG
- Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan
- Advokasi kebijakan responsif gender

b. **Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak** dengan indikator :

- 1) *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 154.872.409,00 dari anggaran dinas Rp. **8.708.917.614,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 2 adalah 1,78 % dari seluruh anggaran dinas.
- 2) *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 320.414.978,00 dari anggaran dinas Rp. **8.708.917.614,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 3 adalah 3,68 % dari seluruh anggaran dinas.

Didukung oleh realisasi :

- Program Perlindungan Perempuan (81,61%)
- Program Pemenuhan Hak Anak (89,93%)
- Program Perlindungan Khusus Anak (89,26)
- Dukungan Program Penunjang

Alokasi pada sasaran ini digunakan untuk :

- Layanan korban kekerasan di UPT PPA dan Rumah Aman
- Fasilitas Pemenuhan Hak Anak
- Koordinasi lintas sektor penanganan kasus
- Sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan

Sasaran ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung capaian 100% penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak

c. **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB; dengan indikator *Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur***

Mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.748.242.516,00 dari anggaran dinas Rp. **8.708.917.614,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 4 adalah 31,56 % dari seluruh anggaran dinas.

Sasaran ini didukung oleh realisasi:

- Program Pengendalian Penduduk (84,84%)
- Program Keluarga Berencana (77,16%)
- Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (95,92%)

Alokasi pada sasaran ini diarahkan untuk :

- Pelayanan dan fasilitas KB
- Edukasi perencanaan keluarga
- Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Penguatan data dan informasi kependudukan

Capaian TFR sebesar 1.89 menunjukkan efektivitas alokasi anggaran dalam mendukung pengendalian penduduk

d. **Meningkatnya Kinerja perangkat daerah dengan indikator *Nilai SAKIP Perangkat Daerah***

Mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.669.278.511,00 dari anggaran dinas Rp. **8.708.917.614,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 5 adalah 53,96 % dari seluruh anggaran dinas.

Didukung oleh realisasi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kewenangan kabupaten/Kota (97,49%)

Alokasi ini digunakan untuk :

- Perencanaan dan evaluasi kinerja
- Administrasi umum dan kepegawaian
- Pengelolaan keuangan dan pelaporan
- Penyediaan sarana dan prasarana

Sasaran ini berkontribusi terhadap capaian Nilai SAKIP 85,50.

Kesimpulan :

1. Alokasi anggaran telah mendukung seluruh sasaran strategis secara proporsional
2. Sasaran perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian

penduduk memperoleh dukungan anggaran yang memadai dengan capaian kinerja yang optimal

3. Dukungan Program Penunjang berperan penting dalam menjaga kualitas tata kelola dan akuntabilitas
4. Untuk ke depan, penguatan alokasi pada pemberdayaan perempuan diperlukan untuk mendorong peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dengan demikian, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja berbasis hasil.

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menunjukkan keterkaitan yang kuat antara pelaksanaan program, realisasi anggaran dan hasil yang diperoleh. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.13
Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	100,00	100,00	100,00			
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100,00	100,00	100,00	786.109.200	761,209,879	96,83
	Persentase perempuan pengambilan keputusan public	45	47	104.44			

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	0,33	0,33	100,00			
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	154.872.409,00	126.383.956,00	81,61
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100,00	100,00	100,00	154.872.409,00	126.383.956,00	81,61
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	320.414.978	286.116.538	89,30
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	100,00	100,00	100,00	160.231.200	156.105.380	97,43
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100,00	100,00	100,00	404.612.450	297.587.090	73,55
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	1,94	1,89	102,57	2.748.242.516,00	2.368.752.534,00	86,19
Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	25,14	26,70	106,21	218.275.629,00	185.194.792,00	84,84
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	74,46	74,10	99,52	1.296.710.800,00	1.000.569.706,00	77,16
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak	8,25	8,10	101,82			

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	terpenuhi (Unmet Need)						
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok tribina dan UPPK yang ber KB	74,46	71,15	95,55	1.233.25 6.087,00	1.182.98 8.036,00	95,92
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,34	85,50	100,19	4.699.27 8.511,00	4.581.19 2.603,00	97,49
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	89,23	102,56	4.699.27 8.511,00	4.581.19 2.603,00	97,49

Secara umum, capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang baik :

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercapai 91,81% dari target
- Persentase kelembagaan PUG aktif tercapai 100%
- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan tercapai 100%
- Total Fertility Rate melampaui target dengan capaian 102,58%
- Nilai SAKIP melampaui target dengan capaian 100,19%

Dari enam indikator utama, lima indikator telah mencapai atau melampaui target, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi anggaran, secara agregat anggaran berada pada kategori baik, dengan sebagian besar program terealisasi diatas 80%.

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	Ket
1	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	90,60	96,83	0,94	Tidak Efisien
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00	96,83	1,03	Efisien
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	81,61	1,23	Efisien
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	89,30	1,12	Efisien
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	102,57	86,19	1,19	Efisien
5	Meningkatnya kinerja Peragkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,19	97,49	1,03	Efisien

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi sejauh mana sumber daya seperti ketersediaan anggaran, SDM digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yaitu dengan mengukur perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang dicapai (output). Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Sasaran 1 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tingkat efisiensi kinerja dibanding

penyerapan anggaran sebesar 0,94 sehingga termasuk tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 90,60% membutuhkan anggaran sebesar 96,83%.

2. Sasaran 2 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Kelembagaan PUG yang aktif” tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,03 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 96,83%.
3. Sasaran 3 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak” dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,23 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 81,61%.
4. Sasaran 3 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk indikator “Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,12 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 89,30%.
5. Sasaran 4 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB” tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,19 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 102,57% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 86,19%.
6. Sasaran 5 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya Kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1,03 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,19% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 97,49%.

C. PRESTASI / PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar berhasil meraih beberapa prestasi yang menjadi indikator pengakuan atas kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

1. Juara 3 Kampung KB - Rahayu Kelurahan Klampok

Kelurahan Klampok meraih juara III Kampung KB pada tingkat penilaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Kemenduk Bangsa/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Juli 2025 yang diterima oleh Kepala DP3AP2KB Kota Blitar.

Prestasi ini menunjukkan keberhasilan dalam :

- Integrasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- Penguatan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga
- Kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat

Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas terhadap kampung KB sebagai model pembangunan berbasis keluarga.

2. Penghargaan Kota Layak Anak Peringkat NINDYA

Kota Blitar kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak dengan predikat Nindya pada tahun 2025 yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2025 dan diterima oleh Walikota Blitar.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan capaian daerah dalam :

- Pemenuhan hak dan perlindungan anak
- Penguatan kelembagaan dan regulasi perlindungan anak
- Penyediaan layanan ramah anak
- Partisipasi anak dalam proses pembangunan

Predikat Nindya menunjukkan bahwa Kota Blitar telah memenuhi sebagian besar indikator Kota Layak Anak dengan kategori tinggi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai predikat utama.

Kesimpulan :

Prestasi dan penghargaan yang diraih pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Bidang Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak telah berjalan dengan baik dan mendapatkan pengakuan eksternal.

Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendorong inovasi program dalam rangka mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga berkualitas di Kota Blitar.



BAB IV

PENUTUP



dp3ap2kb.blitarkota.go.id



dp3a-p2kb@blitarkota.go.id



Dinas P3AP2KB Kota Blitar



[@dp3ap2kb.kotablitar](https://www.tiktok.com/@dp3ap2kb.kotablitar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2025. Laporan ini juga akan dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat Langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja di masa-masa mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Secara Umum Baik

Dari enam indikator kinerja, lima indikator telah mencapai dan bahkan melampaui target, yaitu :

- Persentase kelembagaan PUG aktif (100%)
- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan (100%)
- Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan (100%)
- Total Fertility Rate melampaui target
- Nilai SAKIP melampaui target

Satu indikator yang belum mencapai target yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi dan pemberdayaan perempuan

2. Pengendalian Penduduk dan Tata Kelola Pemerintahan Menunjukkan Hasil Optimal

Capaian TFR yang lebih baik dari target menunjukkan efektivitas program keluarga berencana. Nilai SAKIP yang meningkat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak Terlaksana Secara Optimal

Penyelesaian 100% kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan pada UPT PPA menunjukkan sistem layanan berjalan efektif, didukung koordinasi lintas sektor yang baik.

4. Pengelolaan Anggaran Efektif dan Efisien

Realisasi anggaran sebagian besar pada kategori baik, dengan capaian kinerja yang optimal. hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

5. Prestasi dan Pengakuan Eksternal Mendukung Citra Kinerja Positif

Perolehan Juara III Kampung KB dan Predikat Kota Layak Anak (Nindya) menjadi bukti pengakuan atas komitmen dan kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan efektif dengan dukungan tata kelola yang baik. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan penguatan outcome pembangunan berbasis gender dan keluarga tetap menjadi fokus perbaikan pada periode berikutnya.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, diharapkan kinerja pada tahun mendatang semakin meningkat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Kota Blitar.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya :

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Indeks Pemberdayaan Gender sudah tidak digunakan sebagai indikator karena tidak mampu menggambarkan pemberdayaan perempuan secara komprehensif (terlalu sempit hanya mengukur 3 aspek utama) padahal sebenarnya pemberdayaan gender jauh lebih luas	Pada perencanaan berikutnya akan di ganti indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kot a - Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kot a	- Dalam Renstra disebutkan indikator gender yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	√	√	√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
2	Belum optimalnya implementasi PUG dalam : A. 3 (tiga) prasyarat utama yaitu : 1. Komitmen (Regulasi PUG, Integrasi Kebijakan) 2. Kelembagaan (Rencana Aksi Daerah, Focal Point); 3. SDM dan data terpilah) B. 7 (tujuh) proses pembangunan yaitu : 1. Perencanaan (penetapan Program) 2. Penganggaran (ARG) 3. Pelaksanaan (Implementasi) 4. Pemantauan (Monitoring, Feedback) 5. Evaluasi (Indeks PUG) 6. Pengawasan (Kepatuhan, Pengendali Risiko) 7. Pelaporan (Konsolidasi, Pelaporan PPE, Publikasi)	- Sosialisasi kewajiban PUG dalam pedoman OPD - Integrasi indikator gender dan forum analisa indikator - Penyesuaian RAD PUG - Orientasi dan mentoring focal point - Integrasi ARG - Standarisasi Metadata data terpilah - Penyelarasan isu gender - Pembuatan standar layanan inklusif OPD dan SOP kolaborasi masyarakat dengan dunia usaha - Penilaian kepatuhan implementasi PUG - Checklist pengawasan responsif gender	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kot a	- Tersedianya Perda/RAD PUG - Indikator gender didukung RPJMD - Perwali No 15 tahun 2024 sudah revitalisasi - Tersedia focal point - Tersedia fasilitator PUG - Tersedia data terpilah gender dalam adata dan simpedak - adanya regulasi ARG - Terlaksananya Desk PUG - Tersedianya data statistik - Tersedia regulasi kepatuhan PUG - Adanya sistem pengawasan - Tersedianya website pemerintah daerah	√	√	√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
3	Keterlibatan lintas sektor belum sepenuhnya sistematis terutama unsur non-pemerintah dan APH	Penguatan jejaring perlindungan perempuan berbasis multipihak	-Program Perlindungan Khusus Anak -Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a -Sub Kegiatan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Keterlibatan unsur non pemerintah (Satgas PPA) dan APH dalam perlindungan perempuan baik dalam pelaporan atau penanganan kasus	√	√	√
4	Layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum optimal yang dikarenakan : a. SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap anak hanya Ka. UPT PPA tidak ada JF/ pelaksana sehingga selama ini untuk penanganan/pendampingan kasus dibantu oleh Tim Kerja UPT PPA b. Peningkatan kasus	a. Keterbatasan SDM : laporan Walikota tembusan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Kota Blitar b. Pencegahan kekerasan dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi	-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a -Kegiatan Administrasi Kepegawaian -Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan -Program Perlindungan Khusus Anak -Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	a. - Terkirimnya laporan pada Walikota dan BKPSDM serta Bagian Organisasi - Terisinya formasi JF/pelaksana pada UPT PPA baik ASN atau Tenaga Pendukung Lainnya b. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menurun	√	√	√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	kekerasan terhadap anak pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum mampu menekan faktor risiko di tingkat keluarga atau sekolah		a -Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kot a				
5 a	Masih minimnya pengetahuan, motivasi dan partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program Bangga Kencana	Meningkatkan kapasitas kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) yang sangat krusial dalam menurunkan TFR karena mereka sebagai ujung tombak penggerak Program Bangga Kencana di tingkat kelurahan/basis	-Program Pembinaan Keluarga Berencana -Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) -Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		√	√	√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
b	Perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja pengendalian penduduk belum optimal sehingga dalam menghadapi Dinamika struktur penduduk (bonus demografi) perlu diperkuat	Menyusun perencanaan terintegrasi serta evaluasi berbasis data (seperti indikator Bangga kencana dalam SIPERINDU)	- Program Pengendalian Penduduk - Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi keluarga	Data SIPERINDU terisi 100% mulai dari perencanaan (target) sampai evaluasi (realisasi)			
c	Belum optimalnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan keluarga	Memperkuat edukasi pengasuhan dan perencanaan keluarga	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Sub kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) tercapai 100% (realisasi dibagi target)			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
6	a. Analisa atas faktor pendukung dan penghambat pada monev rencana aksi jabatan administrator dan pengawas pada Tri bulan I tahun 2025 belum disertai faktor pendukung dan penghambat serta rekomendasi atau rencana perbaikan b. Perumusan sasaran pada Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya berorientasi outcome pada level kinerja jabatan administrator c. Reviu atas laporan kinerja belum terdokumentasi d. rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti namun belum	a. Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi serta melakukan follow up atas saran yang telah diberikan b. Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh bidang untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya berorientasi outcome pada level kinerjanya dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat relevan dan memberikan continuous improvement pada pencapaian kinerja yang ditetapkan c. Meningkatkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kot a - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Monev Renaksi dan Monev RKPD Tahun 2025 sudah disertai analisa faktor pendorong dan penghambat serta rekomendasi b. Tersusunnya Pohon Kinerja 2026; Renja 2026; PK JPT Pratama, administrator dan pengawas 2026 c. Tersusunnya dokumen reviu laporan kinerja d. Tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja karena belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan dan peningkatan kinerja.	an kualitas laporan kinerja dengan melakukan reviu laporan kinerja d. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya					

Langkah perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan dampak pembangunan pada tahun berikutnya, sehingga terwujud perempuan berdaya, anak yang terlindungi, serta keluarga berkualitas di Kota Blitar secara berkelanjutan

Demikian semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2025 dapat sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta masukan bagi segenap pihak yang berkepentingan.



LAMPIRAN



dp3ap2kb.blitarkota.go.id



dp3a-p2kb@blitarkota.go.id



Dinas P3AP2KB Kota Blitar



[@dp3ap2kb.kotablitar](https://www.tiktok.com/@dp3ap2kb.kotablitar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

VISI KOTA BLITAR : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
 MISI KE 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,35	68,6	67,8	67,87	74,2	75,50	76,59	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah lembaga PUG yang aktif dibagi jumlah lembaga PUG yang tersedia x 100	47,25	-	47,26	47,28	100	100	100	1. Penyusunan payung hukum tentang PUG 2. Peningkatan kapasitas perempuan 3. Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik 4. Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
										Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di kali 100	100	100	100	100	100	100	100	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
										Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di kali 100	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

VISI KOTA BLITAR : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI KE 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	1,06	0,6	0,67	0,67	1	1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rumus Total Fertility Rate	2,14	2,13	2,13	2,12	1,94	1,94	1,94	1. Peningkatan partisipasi peserta KB aktif 2. Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB 3. Peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15- 19 tahun) 4. Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	

VISI KOTA BLITAR : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
 MISI KE 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A (82)	A (83)	A (85,32)	A (85,34)	A (85,36)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A (82)	A (83)	A (85,32)	A (85,34)	A(85,36)	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	PROGRAAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

Blitar, 24 Februari 2026

 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
 dan Keluarga Berencana



MUJIANTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720214 199201 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA BLITAR

Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Target 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Dana
Meningkatnya kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3,300,000
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	7,374,800
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3,489,509,795
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	17 laporan	2,250,000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 paket	7,096,000
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	96,537,900
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum PD sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	8,571,000
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	22,094,600
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	12,413,000
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	10,425,000
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17,994,300
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,700,000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	100,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4,643,600
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	10 unit	91,385,900
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,190,000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	77,568,360
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	250,629,000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara yang Sesuai Standart	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	112,699,256
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	36,896,000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	342,000,000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	2,000,000
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100.00%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	0.003%	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran yang responsif Gender (ARG) yang sudah di analisis	42%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	46,109,200
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100%	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi dalam bidang politik hukum sosial dan ekonomi	20,67 %	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 dokumen	165,000,000
				Persentase perempuan pengambil keputusan publik	45%				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	110,000,000

						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	3 organisasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	21 lembaga	70,000,000
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	614 orang	395,000,000
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	42,664,700
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Perlindungan yang aktif memberikan layanan pendidikan	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	36 orang	21,869,881
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 layanan	39,040,428
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	42 orang	5,013,800
									Penguatan antar Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	46,283,600
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelemagaan pemenuhan hak anak	100.00%	Pelemagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelemagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelemagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	21,194,000

						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100%	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	31,178,400			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	52,831,655					
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100.00%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100%	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	3 kegiatan
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	24 orang	11,233,000
												Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	85 layanan	27,292,504
												Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	100%	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah/kabupaten
						Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	1,94	PROGAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23.35	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan	23,12	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase profil kependudukan yang tersedia	100%	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	3 laporan							60,000,000,000			
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersediany	21 Dokume							47,076,800.00			
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan							41,400,000.00			

							Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	36,000,000.00			
							Penyusunan Profil program Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	17,500,000.00			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,25	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	3 kecamatan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan	75,000,000			
							Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	9 Laporan	67,200,000			
							Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen	100,000,000			
							Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	250,000,000			
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100%	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	421 Orang	422,730,800
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	50%	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	488 Orang	288,672,000

				Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	(MKJP)		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	13,508,000		
							Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	20 Orang	34,800,000		
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	100%	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Kampun g	44,800,000		
			PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB	74,46	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100%	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	298,692,287
							Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 unit	130,000,000		
							Orientasi/Pelatihan TeknisPelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	60 orang	16,763,800		

						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	3 laporan	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/Kelahiran Baduta / Balita	3 laporan	345,000,000
									Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/Kelahiran Baduta / Balita yang mendapat pendampingan	2823 laporan	414,000,000

Blitar, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar



MUJIANTO, S. Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19720214 199201 1 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUJIANTO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 20 Oktober 2025
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
Kota Blitar**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.50(indeks)
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1.94(Angka)
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	100.00(Persen)
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100.00(Persen)
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100.00(Persen)
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.34(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	215,210,923.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105,204,055.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,233,256,087.00	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Alokasi Umum (DAU)
4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	154,872,409.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,296,710,800.00	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Alokasi Umum (DAU)
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	786,109,200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	218,275,629.00	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Alokasi Umum (DAU)
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,699,278,511.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
Total:		8,708,917,614.00	


Wali Kota Blitar,

SYAUQUE MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
Kota Blitar,


MUJIANTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720214 199201 1 003

PENGUKURAN KINERJA ESELON II
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR
TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi Kinerja					Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP (Equality Distributed Equivalent Percentage) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang equivalent dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen nilai EDEPnya dibagi 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG 1/3 (Ipar + IDM + Iinc-dis) Ipar : Indeks Keterwakilan parlemen IDM : Indeks pengambilan keputusan Iinc-dis : indeks distribusi pendapatan	75.50	67.8300	68.4000	68.4000	68.4000	68.4000	
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah kelembagaan PUG yang aktif dibagi jumlah kelembagaan PUG, dikali 100%	100.00	83.3300	83.3300	83.3300	100.0000	100.0000	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan di bagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali 100 %.	100.00	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali 100%	100.00	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur	1.94	0.0000	0.0000	0.0000	1.8900	1.8900	
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.34	0.0000	85.5000	85.5000	85.5000	85.5000	85.66

Blitar, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
Kota Blitar,



MUJIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720214 199201 1 003